

NOTULENSI DISKUSI BULANAN

“PRAKTIK-PRAKTIK PENGGUNAAN DANA DESA”

INSTITUTE FOR RESEARCH AND EMPOWERMENT

Forum Information:

Issue : “Praktik-Praktik Penggunaan Dana Desa” Date/time: Friday, 27 April 2018 / 13.30-16.50 WIB Location : Joglo Winasis, IRE	Attendees: <ol style="list-style-type: none">1. Wahyudi Anggoro Hadi (Kepala Desa Pangguharjo)2. Dr. Arie Sujito (Sosiolog UGM dan Peneliti IRE)3. Wiwin Indarwati (Kepala Desa Pojok Kabupaten Karanganyar)4. Titok Hariyanto (Deputi Pengembangan Program dan Jaringan IRE)
Note taker: Isma Swastiningrum	Moderator by: Nurma

Agenda Items:

1. Pembukaan
2. Penyampaian materi oleh Wiwin Indarwati
3. Penyampaian materi oleh Wahyudi Anggoro Hadi
4. Penyampaian materi oleh Titok Hariyanto
5. Penyampaian materi oleh Arie Sujito
6. Tanya Jawab
7. Penutup dan pembagian buku

Discussion Content:

Name	Speech
MC	<ul style="list-style-type: none">- Assalamuailaikum wr. wb.- Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Sunaji direktur IRE, Pak Titok, Pak Arie Sujito, Ibu Wiwin, Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, serta tamu undangan, dan peserta seluruhnya.- Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di diskusi rutin kami di

	<p>praktik-praktik penggunaan dana desa. Kami akan membahas pengalokasian dana desa dan bagaimana efektifitasnya agar dikelola secara maksimal. Ini membahas praktik dana desa untuk rakyat. Titik poinnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana desa menentukan prioritas 2. Bagaimana partisipasi masyarakat akan dana desa tersebut 3. Bagaimana memperkuat akuntabilitas dana desa <ul style="list-style-type: none"> - Susunan acara: pembukaan, sambutan Pak Sunaji, diskusi, tanya jawab, dan penutup. - Pembukaan, mari mengucapkan bismillahirohmanirohim - Kedua, sebutan dari pak sunjai
Sunaji	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr wb - Yang saya hormati Pak Hanggoro, Bu Wiwin yang sudah hadir sejak jam 11, juga Pak Ari Sujito, Mas Titok yang berbahagia. - Terima kasih sudah hadir untuk kesekian kalinya di Joglo Winasis ini. Berbagi pengetahuan, rasa duka dan bahagia, kesempatan siang ini kita coba mengelaborasi praktik dana desa sejauh ini. IRE sudah bolak balik melihat dari aspek kebijakan, regulasi, dan advokasi hingga ke desa. Nanti bisa dieksplor pemahaman dana desa dan penggunaan dana desa pasca diatur regulasi PP 60 sampai pengaturan menteri desa hingga bupati. Itu yang nanti kita lihat. - Pak Jito sangat kredibel, pernah satu periode di satgas desa, meski sekarang keluar. Dan di sini kita punya dua kepdes yang menurut cerita di atas rata-rata. Ada Pak Hanggoro yang punya portofolio yang baik. Bu Wiwin mewakili <i>landscape</i> yang ada di desa Jateng. Nanti bisa diceritakan bagaimana Bu Wiwin sebagai Kepdes merespon <i>policy</i> dan menginisiasi kebijakan dana desa. - Ini kesempatan yang baik, nanti waktu bisa ditarik ulur, bisa jam 4 bisa jam 6 selesai. Maaf kalau tempatnya terbatas, lesehan, maaf kalau IRE ada yang kurang. Jangan lupa nama dan alamat diregistrasikan, biar bisa mengontak <i>jenengan</i> dengan tema yang lain.

	<ul style="list-style-type: none"> - Selamat berdiskusi. Matur nuwun. Wassalamualaikum wr. wb.
MC	<ul style="list-style-type: none"> - Acara selanjutnya sesi diskusi. Sesi ini akan dipandu moderator kita Mbak Nurma untuk memandu seksi diskusi ini.
Nurma	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr. wb. - Selamat siang bapak ibu sekalian, selamat datang di IRE. Di sini telah hadir 4 pembicara, 2 dari pelaku desa (Kepdes), dan 2 dari IRE. - Selama implementasi UU Desa yang lebih dari 3 tahun, dana desa ini paling seksi isunya. Masyarakat desa tahunya juga lebih ke bagaimana dana digunakan. Tapi bagaimana dengan pengelola desa mengelola dana desa? Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam dana desa? Inovasi seperti apa? Hari ini kita akan banyak belajar dari para pemerintah desa. - Pertama saya persilahkan terlebih dahulu, kepada Ibu Wiwin dari Karanganyar.
Wiwin	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr. wb. - Tadi sudah disampaikan, kami satunya kepdes perempuan di sini yang datang. Langsung saja soal dana desa, saat ini kami melebihi artis, semua memandang ke desa, entah itu dari masyarakat, LSM, pemerintah, petugas pengevaluasi, semua tertuju ke desa. Saat ini desa banyak sekali dananya yang ditransfer di desa. Kami selaku Kepdes, kami menjabat mulai dari 27 Maret 2013, waktu itu UU belum ditetapkan. Dana desa belum ditransfer, tentunya ada persiapan, dengan memahami adanya UU desa kita sebagai pelaku dituntut bagaimana menerapkan UU Desa. Pada tema siang hari ini, kami dalam menentukan prioritas kegiatan dana desa, kami tetap memprioritaskan usulan dari masyarakat. Kami mulai dari aspirasi masyarakat lewat Musdus (musyawarah dusun), juga lewat pengajuan. Pengkerucutannya di Musdus. Di sana banyak sekali usulan, di situ persaingan sudah mulai ketat. Dari Musdus ke Musdes, kami sebagai kepdes, hanya memfasilitasi bagaimana masyarakat menentukan prioritas. - Kami awal sebagai kepdes, mengirim surat pemberdayaan ke DIY, agar ada pelatihan bagaimana masyarakat ada pemikiran untuk berdaya.

- Secara umum masyarakat cuek, mau dananya sedikit/banyak yang penting bangun. Kalau kepentingan masyarakat tidak diinventarisir, berarti cuek. Kami mengirimkan lima orang untuk ikut pelatihan di Disnakertrans DIY. Lima perwakilan itu harus sosialisasi ke masyarakat untuk memberdayakan desa dan itu berhasil dengan munculnya usulan yang terkaver di Musdes.
- Di Musdes kami kembali menentukan skala prioritas. Kami bekerja sama dengan semua. Dari kader pemberdayaan masyarakat berhasil menginventarisir usulan masyarakat yang kami rangking jadi skala prioritas. Kami masukkan dalam RPJMDes. Setiap tahun perjalanan kami seperti itu.
- Di tahun pertama, karena sudah punya RPJMDes, jika masyarakat menghendaki lebih dari RPJMDes, maka akan dimasukkan ke RKP Desa. Dari sana kita bisa melihat prioritas Desa Pojok itu seperti apa. Masyarakat lebih ke sarana prasarana, tapi juga tidak mengesampingkan kesehatan dan lain-lain. Meski prioritas lebih ke infrastruktur. Karena masyarakat kami ke pemberdayaan, masyarakat juga antusias.
- Kami menguashakan pelaksanaan dana desa. Pesan dari Bu Menteri: dana desa bukan untuk kepdes, tapi untuk masyarakat. Kalau kita sudah memahami praktik dana desa enak, tapi melihat pesan ibu menteri juga patut dirunut kembali. Motivasi Bu Menteri harus menunjukkan kami bisa.
- Pembentukan TPK untuk melaksanakan, meski TPK juga ada PHP.
- Praktik di dana desa kita harus memahami tata kelola pelaksanaan dana desa.
- Kami mengelola 3.5 M. Untuk kepercayaan masyarakat kami bersama dengan TKP, tidak lepas dari pengawasan masyarakat. Saat melaksanakan infrastuktur kami memakai lokal. Seluruhnya kami gunakan wilayah lokal, juga ada TPK.
- Kepdes hanya untuk memantau dan mengarahkan, kepdes tidak seharusnya dan tidak benar jika kepdes itu pegang uang, sesuai pesannya

	<p>ibu menteri.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Saya kira itu, untuk mengawali diskusi siang hari ini. Mungkin nanti ada yang perlu kita sampaikan. Kami berusaha <i>sharing</i>, mungkin nanti ada kekurangan dan ada yang kurang pas, bisa <i>sharing</i>. Nanti pulang ke Karanganyar bisa bawa oleh-oleh. Oleh-oleh ilmu bagaimana menerapkan dana desa, sesuai cita-cita UU Desa. - Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum wr. wb.
Nurma	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih Ibu Wiwin. Kalau di Desa Pojok, perangkat Desa melakukan berbagai persiapan menyambut UU Desa, termasuk juga mendidik masyarakat menjadi kader-kader yang menggali potensi masyarakat dan bekerja sama dengan kader-kader penggali. - Juga diusahakan prioritas dari masyarakat dan memakai bahan-bahan lokal. - Selanjutnya praktik di Bantul ada Pak Wahyudi. Monggo diceritakan bagaimana pengelolaan dana desa dan pelibatan masyarakat.
Wahyudi	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr. wb. - Terima kasih atas kesempatannya berbagi cerita, terkait implementasi dana desa, di mana dampaknya UU Desa adalah dana desa. Dana desa itu instrumentasi, yang substansif asas yang melatarbelakangi UU Desa itu, yaitu rekognisi. Desa mendahului kelahiran negara, adanya pengakuan itu, ada kewenangan asal usul. Kalau kita perinci ada 120 kewenangan lokal yang terbagi jadi 4. - Dalam sistem pemerintahan ada kewenangan menyertakan anggaran. - Dana desa itu instrumen menjalankan kewenangan UU Desa. Dana desa kita anggap sebagai dana-dana yang lain. Artinya kita menempatkan dana desa sebagai alat membangun kedaulatan dan kemandirian desa. Terkait implementasi UU Desa, kami menerapkan strategi sepak bola, melakukan apapun asal tak melanggar aturan. Kita maksimalkan untuk membangun kemandirian desa. Mungkin ada gambaran tentang Desa Pangguharjo, sebagai implementasi UU Desa. Desa Pangguharjo 1 dari 75 desa yang ada, jumlah penduduknya 28.000 tapi yang berdomisili

40.000, di sana ada universitas dan pesantren, dan yang berbatasan dengan provinsi, menjadi kawasan strategis ekonomi kota Jogjakarta.

- Kami menghitung upah sektoral warga, totalnya 86 M, terbanyak dari sektor perdagangan dan pertanian. Jadi lebih banyak ke perkotaan karena sektornya perdagangan. Pun demikian kalau bicara kemiskinan, juga mencirikan potret kaum miskin kota yang dicirikan *landless* dan *homeless*, tak punya tanah tak punya rumah. Sehingga warganya sebagai kontraktor, kontrak sana, kontrak sini,
- Terkait dengan kapasitas keuangan, dana ke desa itu kecil dibandingkan yang lain. Pendapatan asli Desa Pangguharjo untuk pemberdayaan, kami mengelola 5,6 M.
- Penyelenggaraan dana desa, kami dipandu oleh satu visi: kemandirian. Hal ini bisa tercapai jika tata kelola bersih, transparan, dan bertanggungjawab. Ini adalah prasyarat untuk memandirikan dan mensejahterakan desa. Demokratis dan berkesadaran itu perspektif.
- Terkait dengan bagaimana pemerintah Desa Pangguharjo membangun perencanaan dana desa dan sebagainya, kami mengembangkan satu perencanaan berbasis dana spasial. Ada 5 metadata:
 - 1) Data kependudukan yang tekoneksi dengan isitem administrasi, sehingga kalau ada perubahan bisa terkelola baik.
 - 2) Data bio-fisik, tentang lingkungan, kepemilikan rumah tak layak huni.
 - 3) Data sosisl sebaran penduduk berdasarkan kesejahteraannya. Juga tentang balita gizi buruk, disabilitas, dll.
 - 4) Data ekonomi.
- Keempt data kita kelola dalam sisten Keuangan Desa. Dari sistem itu ada tiga isu utama: Tansrpnis; Pelayanan yang dibutuhkan; bidang pemberdayaan.
- Terkait dengan pelayanan publik, guna memperdayakan, kami punya 8 pemberdayaan: dari perempuan sampai aspirasi masyarakat.
- Tadi sebagai prasyarat, diarahkan hampir 40 persen diarahkan ke tata desa; pengelolaan desa yang baik, juga pemerintahan desa terkait dana

desa.

- Beberapa saat setelah ditetapkan UU 6 yang bersumber dana desa, kami minta asistensi. Juga membangun transparansi kami bangun
- Membangun partisipasi, itu berbanding lurus dengan kepercayaan. Sejauh percaya, berarti layak dipercaya. Baru saat itu lahir partisipasi. Dalam bidang pendidikan, kita punya ukuran yang disebut Indeks Pendidikan. Pendidikan satu rumah satu sarjana. Memberi akses pendidikan setingginya lewat beasiswa dan tunjangan. Juga asuransi pendidikan. Kalau rata-rata pendidikan SMA.
- Kita memprioritaskan pendidikan kepada masyarakat yang dalam 10 tahun mendatang tak akan berubah hidupnya kecuali dapat lotre,
- Dalam bidang kesehatan ada program desa bebas 4 masalah kesehatan (DB4MK): balita gizi buruk, kematian bayi, kematian ibu melahirkan, DBD.
- Misal kalau ada ibu hamil datang laporan ke pak lurah, pak lurah saya hamil, dia dapat layanan paripurna.
- Di bidang ekonomi karena *landscape* kita tak baik, sehingga yang kita manfaatkan, *landscape* ekonomi (bentang hidup masyarakat desa), yang kita gunakan dalam upaya memberdayakan masyarakat desa. Di tahun 2013 awal kita memberi modal, asetnya sekarang 5 Milyar. Kita juga mengembangkan sistem aplikasi berbasis android, sehingga tahu Bumdesnya berapa.
- Yang perlu kami sampaikan pendirian itu tak hanya membuat saja, dia juga menjadi perwakilan yang selalu menyapa warga desa. Ada gak permasalahan yang perlu disampaikan pada pemerintah desa. Dari sana kita dapat masukkan tentang masalah-masalah yang dialami masyarakat. Salah satunya kita melepaskan sebanyak 140 warga dari jeratan rentenir.
- Di Program Pemberdayaan Bidang Keamanan dan Ketertiban dengan mewujudkan ketertiban umum, menuju masyarakat yang aman dan damai. Angka kejadian kasus gangguan keamanan meliputi: perkelahian, percurian dan perampokan, kejahatan seksual, dll.

- Terkait partisipasi masyarakat, itu berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat desa pada para pejabat pemerintah desa.
- Di Pangguharjo punya 120 perangkat desa, 120 orang hanya punya 4 kewenangan.
- UU Desa memberikan satu ember keuangan, tapi kapasitas desa cuma satu gelas, lalu strategi kita menciptakan gelas-gelas baru. Perangkat-perangkat desa yang ngurusi. Bersama-sama menyelenggarakan fungsi pemerintah desa, berkaitan dengan kegiatan yang lain, seperti PAUD, Perempuan, dll. Akhirnya beberapa kami limpahkan ke PKK Desa. Maka wajib bagi pemerintah desa memberi anggaran. Sehingga pol hanya 50 persen dana untuk desa, tapi lainnya untuk lembaga-lembaga.
- Semua elemen kita hidupkan kembali menjalankan kewenangan pemerintah desa. Sebagai penutup, ada semacam tesis. Pengalaman 6 tahun, saya diangkat kepedes 6012: kemandirian desa bukan ditentukan oleh aspek geografis, semua memiliki kesempatan yang sama untuk kemandirian. Juga tidak ditentukan oleh sosiologis, tingkat pendapatan, agama, suku, dll. Kemandirian meliputi: kapasitas sosial (sumber daya yang dimiliki masyarakat), kapasitas politik dan kepemimpinan (kepedes), kapasitas proses (aparatur desa).
- Masyarakat Pangguharjo memiliki profesor 4, master 100, sarjana 1000-an. Besarnya kapasitas tak serta merta sebagai modal sosial yang kita sebut partisipasi, pertanyaan kritisnya: bagaimana yang 28 ribu itu bisa diatur 39 orang. Itu hanya bisa dicapai jika 28 ribu itu percaya kepada yang 39.
- Secara umum kita bermasalah dalam kepercayaan itu. Kita itu punya krisis warga negara tak punya kepercayaan pada negara.
- Kalau ada kampanye lebih ke *wani piro*. Jadi gak bisa nitipin kepercayaan itu. Dua kapasitas inilah yang dipakai: kapasitas politik-kepemimpinan dan kapasitas birokrasi dan proses.
- Caranya bagaimana? Nanti bisa kita diskusikan.
- Sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalmualaikum wr. wb.

Nurma	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak sekali di Pangguharjo memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Ada banyak sekali dari pendidikan, kesehatan, dll. Dana desa memberi peluang menciptakan inovasi baru yang sebelumnya tidak ada, - Di desa lain, kadang dana desa jadi satu-atunya sumber - Selanjutnya Pak Titok dari perspektif IRE
Titok	<ul style="list-style-type: none"> - Assalamualaikum wr. wb. - Kalau bapak ibu melihat dua gambaran: Bu Wiwin dan Pak Wahyudi, punya gambaran dana desa memberi manfaat luar biasa bagi desa. Dalam jangka 5-10 tahun jika konsisten pada UU Desa, peluang keterselesaian ketimpangan bisa dilakukan. Saya juga risi jika ada yang bilang dana desa untuk infrastruktur. Di konteks infrastruktur ada ketimpangan luar biasa di desa. Orang yang ada di perkotaan mudah akses pendidikan dan kesehatan, tapi di daerah pinggiran untuk <i>ngakses</i> infrastruktur dana yang luar biasa parahnya. - Imajinasi dana desa tak serta merta pada infratruktur, tak melulu infraturktur tapi juga pemberdayaan. Saya akan cerita tentang apa yang akan kami lakukan di 32 desa di NTB, Jatim, Jateng. Kita sekarang mengimplementasi UU Desa, ada problem mendasar yang dilihat pemerintah tidak sebagai masalah: Pertama, literasi tentang UU Desa, tapi banyak aparatur desa yang tak memiliki pengetahuan tetang UU Desa. Di UU Desa sudah memberi madnat, desa memberi kewenangan sebagai asal usul, sampai terbagi 4 bidang. Sayangnya desa sampai sekarang ini belum tahu kewenangannya sendiri. Ini persoalan mendasar sehingga desa terjebak imajinasi, lalu mereka harus dapat panduan dari kabupaten. Kedua, kita sekarang menghadapi persoalan dimana kabupaten yang memberi pembinaan tidak melakukan pembinaan secara benar, justru mengbiri rekognisi dan sustabilitas. Ada banyak aturan yang dibuat kabupaten, tapi desa tak mampu mengembangkan inovasi warga desa. Ada Kabupten di Jatitm yang membuat perbup dalam setiap tahun desa 30-40 juta untuk seragam PKK. Padahal untuk PKK gak masalah gak ganti, tapi dipaksa kabupaten. Ketika desa akan berinovasi

dananya sudah tidak cukup. Banyak yang terjadi yang seperti itu, banyak yang membuat prioritas. Ada juga yang sampai RT saja dikasi 50 juta. Kita menghadapi persoalan kabupaten di tangkap pusat, belum menempatkan UU Desa sebagaimana mestinya yang berhak menentukan masa depannya sendiri. Bagaimana yang dirumuskan oleh pemerintah desa dilakukan secara partisipatif dan disinkronkan oleh pembangunan jangka menengah kabupaten dan pemerintah pusat.

- Juga belum lagi lembaga di luar pemerintah daerah menggunakan dana desa. Imajinasi pemerintah pusat, praktik-praktik korupsi tak berlangsung, tapi justru sebaliknya keterlibatan aparat pemerintah hukum justru memicu desa melakukan korupsi lagi. Contoh kabupaten di Jateng, mereka harus mengundang aparat kabupaten, kepolisian, kapolsek, dan koramil. Nah, minimal yang datang 6-9 orang, anggaran untuk itu apakah ada? Tidak. Celaknya ketika tamu itu datang, cuma aqua, lho kok cuma aqua. Mereka sudah tahu. Artinya ketika sudah tak ada anggaran, mereka akan mengusahakan bagaimana suguhan itu pasti ada. Ada yang minta sugu, akhirnya main-main. Persoalan penggunaan dana desa ada masalah di supra desa juga. Itu persoalan yang kita hadapi.
- Praktinya sudah banyak perubahan di masyarakat di dalam proses tata kelola pemerintahan. Relasi pemerintahan dan warga sudah tak seperti dulu. Pemerintah desa tak seperti matahari tunggal, dengan UU Desa warga berani menegur dan mengkritik. Itu yang saya sampaikan.
- Ada persoalan mendasar yang itu penting kita selesaikan bersama.
- Kedua kami mau tunjukkan apa yang kami lakukan di 32 desa, kalau program pembangunan desa itu menjawab persoalan desa yang penting adalah pengorganisasian dan pemberdayaan di tingkat desa.
- Kami masuk di desa memberi pemahaman dengan adanya UU Desa sebenarnya ruang demokrasi ada dan terlibat dalam penganggaran di tingkat desa, Semangatnya luar biasa. Keinginan untuk mereka terlibat dan ingin tahu anggaran pembangunan itu muncul.
- Apa sebenarnya perubahan yang terjadi, UU Desa semangat bergerak itu

muncul sendiri. Ini berbeda nalar. Partisipasi itu juga untuk melakukan pengawasan. Benar gak mau *ngaspal* 10 km, realisasinya seperti apa? Muncul kok dari warga. Ini yang beda dari logika pemerintah kabupaten yang seolah-olah pelaksanaan anggaran seolah harus diawasi lembaga di luar desa.

- Pengorganisasi yang kami lakukan seperti itu.
- Warga desa yang perempuan dan difabel menemui kenali apa yang terjadi di tingkat desa. Melakukan yang sederhana aja dulu.
- Ternyata muncul aspirasi yang tak pernah ditemukan dalam pemerintah desa. Contoh di desa Kebangkalan Banjarnegara, ada yang *ngaggap* masalah sampah. Mereka berinisiatif buat form aspirasi, kemudain form itu dibagi ke setiap KK, ada sekitar 250-an. Ternyata, setelah itu diklasifikasikan, ternyata paling banyak sampahnya adalah sampah pampers. Pampers menyumbat saluran irigasi karena dibuang sembarangan, untuk got itu membuat banjir. Lalu pemerintah desa sadar ternyata masalahnya sampah.
- Juga soal adminduk, ada sekitar 300 orang tak punya adminduk. Ada ibu-ibu yang sejak lahir tak punya KTP.
- Artinya kalau sudah dipicu sedikit saja akan memunculkan upaya desa memperbaiki program pembangunan di tingkat desa. Ketika kita berbicara pembangunan di tingkat desa, desa penting memiliki data yang setiap akses bisa diperbaruhi, agar tepat sasaran. Ini kegiatan selama 6 bulan. Dari proses itu kami menemukan situasi baru, warga desa yang sebelumnya tak bersuara berani bersuara. Warga desa berani mengkoreksi proses pembangunan pemerintah desa.
- Desa yang belum pernah Musdes, melakukan Musdes. Ibu-ibu yang tak pernah terlibat dalam penganggaran kembali terlibat. Forum pemerintah desa dan pmeangunan yang jadi ruang untuk memaparkan, dengan kehadiran ibu-ibu, kemudian menjadi lebih dinamis dan programnya menjadi tidak monoton. Jawaban jadi tidak hanya infrastruktur, juga ide-ide bagaimana agar perempuan di tingkat desa tidak melakukan

	<p>pernikahan di usia dini, dengan sosialisasi bahaya pernikahan dini. Ada perubahan, ada relasi yang berubah, ada kegiatan yang mengarah pada masyarakat desa. Itu kira-kira.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalau kita bicara implemementasi UU Desa yang punya konsen kesana, kami melihat tiga hal yang jadi persoalan: 1) Tatanan regulasi, terlihat regulasi pemerintah pusat/kabupaten mengebiri asas rekognisi. PP 43 dan 60 harus dihapus, kewenangan yang harusnya diperoleh desa harus dapat persetujuan kabupaten dan pemerintah pusat. 2) Dari apa yang diceritakan Bu Wiwin, di 20 desa kami menemukan ada kader pembangunan yang bisa untuk membangun desa. Ada Bu Bidan, Pak Ustad, Guru ngaji, dkk. Kalau dapat pengetahuan mereka mampu mengorganisir di level desa. Kelompok ini harus diperkuat. Sebenarnya yang dibutuhkan kita bukan pendamping <i>drop-drop</i> tapi pendamping organik. 3) Persoalan data yang perlu diperbaiki secara terus menerus. Regulasi terbaik ada di Kebumen, mereka selalu memperbaiki data desa. Tapi sayangnya pengawasan dan pembinaan ke desa tak dilakukan secara serius. Kedua dorongan dan suntikan anggaran ke data juga tak ada. Penting bagi desa memberi batas sebagai pijakan awal arah pembangunan desa. - Kami juga mendiskusikan, imajinasi warga desa dan pemerintah desa lebih banyak dipandu dari luar, termasuk NGO yang melakukan pembinaan di tingkat desa. Tapi satu sisi kami berpikiran bagaimana mendorong desa itu tidak jangka pendek saja, tapi juga jangka panjang. Selama ini yang kami temukan, imajinasi desa itu pendek-pendek. Tidak banyak dimiliki desa. Pangguhharjo pengecualian, <i>state</i> yang dimiliki sudah muncul dan terlihat. - Mungkin itu sebagai pancingan diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.
Nurma	- Selanjutnya yang terakhir, Pak Arie Sujito
Sujito	<ul style="list-style-type: none"> - Asalamualaikum wr. wb. - Tadi Mas Wahyudi sudah banyak cerita, dana desa ini bermanfaat serius

dan signifikan, Bu Wiwin juga cerita corak dana desa berubah.

- UU Desa kalau diperas habis intinya soal dana desa. Soal kewenangan desa, dana, dan SDM. Pengalaman sejarah membuktikan kematian desa karena ketidakadilan sumber daya. Dulu ada asas rekognisi dan itu mengalami kehancuran. Politik desa tak diungkit oleh distribusi *resources*. Cerita dana desa mempengaruhi dana desa. Apakah dana desa bicara uang atau politik uang, bicara teknokrasi atau politik pengambilan keputusan penyaluran.
- Karena dana desa ini ada, cerita dana desa harus diletakkan sebagai faktor yang mempengaruhi desa sebagai subjek. Orang lapar dikasi konsep tentang nasi, tentang kenyang, padahal dia lapar. Ini bagian misi besar transformasi desa.
- Kemandirian desa bisa dipengaruhi oleh *leadership* atau kapasitas sosial masyarakat. Pandangan Titok pandangan Marxist, ekonomi sebagai basis. Dalam kaitan ini terlalu naif desa tak butuh dana, NGO dan PT aja butuh. Ketika dana dikuncurkan sebagai dana desa, dia tidak sekedar dipahami sebagai modelitas administratif dan teknokrasi. Dana desa bisa menggerakkan masyarakat.
- Bumdes di desa lain bentuknya gimana? Pangguharjo lari kencang. Artinya cerita itu menggerakkan kita.
- Bu Wiwin juga bercerita partisipasi desa dari dusun untuk membicarakan kepentingan desa itu proses demokrasi desa. Di sana dana desa menggerakkan partisipasi warga. Dana desa mempolitisi subjek melakukan keputusan. Mari pahami desa sebagai politik anggaran tak sekedar adminisitrasi.
- Proses administrasi berlebihan maisteram dan tak menimbulkan inisiatif lokal. Pangguharjo dapat penghasilan sebesar itu, Kampung Mataraman dikelola Bumdes. Dana desa bisa dipakai modal untuk menggerakkan itu. Transformasi gerakan politik yang sifatnya tak personal. Ini fakta penting dana desa sebagai politik anggaran, tak sekedar baik dan bijaksana; politik anggaran bukan itu, tapi soal pegulatan dan inisiatif warga. Warga

bisa memanfaatkan. Tidak yang saya sebut orang kaya per orang, tapi kaya kolektifis.

- Sama kayak uang 500, 50000, 5000000 di Musrebang dana desa sebagai politik anggaran. 50000 untuk rakyat miskin itu berarti.
- Jangan mendistorsi dana desa sebagai administratif, tapi juga politik anggaran. Kalau hanya segelintir hanya bicara adminitrasi, itu tak berhasil.
- Kedua, apakah dana desa mendorong reformasi pelayanan. IRE riset, ada terobosan dari gerak pemanfaatan dana desa. Upaya-upaya untuk mengambil inisiasi itu muncul, tapi hambatannya di kabupaten. *Bottleneck*-nya di level kabupaten. Kabupaten kalau responsif, akan lancar. Syukur-syukur, negara diam saja akan jalan. Idealnya mereka bantu.
- Kalau kata Faisal Basri, negara *gak* ganggu aja itu udah jalan. Dalam perspektif ini saya katakan ada *miss sense* menciptakan ekonomi dari pinggiran. Imajinasi Jokowi ada, tapi menteri desanya perspektifnya sangat korporasi, bagaimana membawa pengusaha desa masuk desa. Ini bertentangan dengan *bottom up* desa. Ide bagus embung itu. Geliat desa itu penuh keunikan. Proses *approach* itu penting. Ada satu desa yang sekali dikasi tahu gerak, ada yang beratus kali gak ngerti. Ilmu berdesa tak bisa generik. Dana desa menggerakkan reformasi pelayanan, tugas kita cerita yang baik itu harus punya makna.
- Saya ingin debat dulu di parlemen. IRE pasti berteriak keras, minimal saya kalau ada revisi UU Desa yang justru memundurkan desa. Kalau banyak cerita baik, tak ada alasan untuk merevisi.
- Ketiga, dana desa dibaca menggerakkan masyarakat. Kelompok difabel dan perempuan terlibat. Kalau dana desa dipandang sebagai isu politik, ada hak yang harus saya ambil. Cara pandang politik anggaran, saya hargai dana desa menggerakkan partisipasi. Masyarakat punya kesadaran hak atas warga, masyarakat punya kepentingan untuk mengetahui kemana dana desa itu. Partisipasi ini terlihat di SID. Saya tadi dikasi tahu

	<p>bisa dicek dana desa berapa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lalu siapa garda terdepan transparansi? Apakah itu sulit? Tidak. Tapi apakah <i>political way</i> ada? Harus ada <i>actions</i>, kalau teknokrasi ada, gak perlu itu kepolisian. Atau dipasang di warung-warung, mereka diskusi pupuk. Ini sesuatu yang tidak mudah. Untuk menuju kesana, maka isu politik anggaran dan partisipasi masyarakat menjadi kerangka. Ini adalah antitesis menteri desa yang korporatif. Di sini perspektif yang saya sebutkan, presiden dan menteri desa <i>gak</i> nyambung. Dorongan ini yang aku kira harus dibicarakan. Bahkan saya setuju badan desa menggerakkan warga yang di pinggir ke tengah, mereka tak hanya bicara formulir atau kuitansi, tapi juga hak dia sebagai warga. - Keberhasilan kita memberi makna yang lebih politis. Karena pokok persoalan sering disimplifikasi. Ketika kami punya inisiatif ada yang menegur apa ini ada perbubnya, kami berdebat. Fakta perubahan desa yang jadi sub kabupaten harus tercermin dalam politik desa. Saya senang diskursusnya tak hanya soal itu. Tak hanya diskursus administrasi. Untuk memastikan dana desa akuntabel, itu pendekatan demokrasi desa. - Kalau disimplifikasi administrasi, tidak membentuk masyarakat sebagai subjek. - Sampai situ, harus saya akhiri untuk diskusi - Wassalamuaaikum wr wb.
Nurma	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi pertama 4 penanya terlebih dahulu.
Ratmi (Forum Tokoh Perempuan Kespro DIY)	<ul style="list-style-type: none"> - Terkait yang disampaikan Pak Wahyudi, saya menilai kalau kades seperti Pak Wahyudi, Indonesia sejahtera. Di luar sana mungkin ada permasalahan dengan saya yang tidak tersampaikan. Di Pak Wahyudi dengan mudahnya tahu keluhan warga, di tahun 2008 bapak saya jadi rois punya bengkok, saya lewat di bengkok bapak aman-aman saja. Satu jam dapat laporan bengkok'e simbah ditraktor tanpa pemberitahuan apapun. Kebetulan saya aktivis desa, saya langsung sowan ke desa, kenapa kami diperdayakan, bengkok tanah saya kok ditraktor, ditanami tebu. Tapi tidak ada jawaban dan respon, lalu pak dukuh minta bantuan

	<p>ke saya guna nanggap wayang. Saya bilang: pak tulung kalau tanah yang dipakai itu ganti rugi, dananya semuanya untuk wayang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Di Pak Wahyudi, bahkan tukang sampah saja diperdayakan. Bagaimana pak triknya? Terima kasih. - Segelintir keluhan masyarakat kecil.
<p>Feronica Purwaningsih (Seketariat Anak Bangsa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Asalamualaikum wr. wb. - Saya megkenal Pak Wahtyudi sudah lama. Saya bangga di Pangguharjo, di desa saya belum banyak. Saya mendengar paparan yang benar-benar dahsyat. Di desa Pangguharjo, apakah yang mendapat manfaat itu yang ber-KTP atau yang bedomisili? Anak-anak dampingan kami sulit mendapat kesehatan dan pendidikan karena mereka beerdomisili di luar kota. Mereka dari Makassar, Bandung, dll. Apakah yang dapat manfaat yang berdomisili atau yang punya KTP saja? - Tadi ada program satu rumah satu sarjana, itu dahsyat. Apakah kemudian ada anak-anak yang putus sekolah? Dan apakah ini yang penduduk asli saja? Juga kadang yang dicari untuk sekolah yang paling pintar, padahal berkuatnya di orang-orang yang bodoh dan dilacurkan. Saya ingin cerita yang lebih.
<p>Sutiyono (Kepdes)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Assalmualaikum wr. wb. - Yth Pak Jito, Pak Direktur, Pak Wayudi, dan Bu Wiwin, hadirin dari semua penggiat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya merasa anyep setiap diskusi di IRE, kalau riil jadi panas. Yang disampaikan Mas Arie benar dan betul, semoga pas jadi satgas juga begitu. Terkait dana desa, negara belum sepenuhnya. Negara wajib mensejahterakan desa. Saya gemes juga, kalau di desa, Pak Kades minta tolong <i>nglamarke manten</i> saja itu dikasi teh.. dan ini ngurus desa. - Kami khawatir, dengan adanya UU Desa <i>Bottom Planing</i> ini hanya simbolis, yang kami rasakan, SKB 4, surat kebingunan 4 menteri, waktu dekat saja desa sebagai korban regulasi, desa dibuat tak berdaya. Ada contoh yang saat ini terjadi di GK, terkait padat karya tunai desa, ditindaklanjuti SKB 4 desa belum bisa memahami itu. Dananya jadi

	<p>tersandera. Ini gak bisa buat apa-apa. Ada syarat berat, HOK minimal 30 persen, Desember sudah ada Perdes APBDES. Perubahan APBDES itu setahun sekali, mau tidak mau harus buat. Yang lebih berat lagi di situ pekerja itu harus pengangguran, difabel, dll (palutnya), dan itu membutuhkan kemampuan ahli. Itu seperti apa? 30 persen HOK itu menggerus partisipasi masyarakat. Dari persiapan ini harus masuk HOK.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kembali desa diminta pusat untuk mempersejahterakan masyarakat, di desa beliau dengan potensi seperti itu bisa bergerak cepat. Tapi di desa pinggiran, itu susah. Padahal tujuannya <i>Desa wonocolo, pamong notoprojo, hamewayu buwono</i>.
<p>Agus Setianto (pengelola BUMD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Setelah mencermati beberapa pemaparan narsum, dana desa itu berkah, tapi bagaimana desa menyikapi. Banyak perangkat desa yang belum siap. Ketika desa dihadapkan permasalahan lokal, itu bisa dicarikan jalan keluar, tapi yang terjadi harus menunggu perda. Ada desa yang <i>mindset-nya top down</i>. Terus politik <i>downhill</i>, kalau pemerintah desa benar-benar menggerakkan masyarakat, akan memunculkan figur hebat di konstelasi desa. - Tentang BUMD, ketika dana desa dikucurkan ke desa bisa melancarkan urbanisasi, sekarang bagaimana generasi muda mau tinggal di desa. Okelah satu rumah satu sarjana, tapi kalau selesai harus tinggal desa dan membangun desa. Ini tugas berat, banyak generasi muda keluar desa, karena generasi tua tak memberi harapan tinggal di desa. Syukur pendamping dari lokal desa. Dari sarjana yang tahu karakteristik desa. Bumdesnya ada ikatan dinas, yang pintar disekolahkan, trus tinggal di desa. Bumdes itu berorientasi sosial. Selanjutnya bagaimana Bumdes ini jadi daya dorong. Bumdes tak hadir dari ruang kosong, jangan sampai Bumdes menggoncang hal-hal yang kontraproduktif. - Lalu bagaimana menyusun RPJMDes? Biar tak hanya infrastruktur. Bagaimana ketika pemberdayaan juga harus tuntas. Gak sekedar pelatihan. Banyak pelatihan yang selesai hanya di pelatihan. Mau menggerakkan Bumdes itu ya simalakama. Itu kondisi riil. Bagaimana

	<p>nanti kalau ketua Bumdesnya itu pengen berkonstelasi dengan Kepdesnya? Ini tantangan bagi kita semua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Okelah, anda sekarang di kota, tapi anda harus kembali ke desa.
Wahyudi	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih ibu dan bapak yang telah memberikan tanggapan. Tadi ada kapasitas politik dan kepemimpinan. Kapasitas politik lahir dari proses politik yang baik. Kenapa di Pangguharjo itu baik, ketika maju, kita menjaga bagaimana itu berjalan sehat dan melakukan perlawanan terhadap politik uang. Saya akan melawan apapun yang memakai uang untuk menjaga proses politik berjalan sehat. Sehingga untuk memperebutkan 20k suara tak lebih 80 juta, biaya politik tak ada sepersen pun. - Yang dibutuhkan <i>civic education</i>, relasi negara dan warga negara. Tak hanya kepada calon kepdes, tapi juga warga desa. Di satu sisi menerima uang, tapi pengen pemimpin baik. Itu yang mustahil. Ketika menerima uang, hak politiknya gagal. Kenapa desa lain, juga begitu. Dalam hajat politik,, kenapa syarat politik yang mencederai demokrasi? - Setelah prasyarat terpenuhi, ada lima kapastias dari yang mendampingi desa agar kapasitas politik baik: 1) Kapasitas regulasi, melakukan dan memproduksi aturan. 2) Kapasitas distributif, mebagi kewenangannya, 120 kewenangan bagaimana mendistribuskannya. 3) Kapasitas ekstratif, kemampuan mengekstrasi sekecil apapun potensi, untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi. 4) Kapasitas responsif, tanggap. 5) Kapasitas jaringan, tak mungkin sendirian. Menegaskan anak muda: rebut kekuasaan dan lakukan perubahan. Jalankan politik yang baik. Tidak ada politik yang baik tanpa keteladanan. - Di hampir semua level politik itu bermasalah. Kenapa desa kita lambat karena ada dua permasalahan mendasar: 1) Sejak UU 5, desa tak pernah diurus negara. Cara pandang negara terhadap desa seperti itu. Sehingga entitas politik Indonesia lemah. 2) Dalam sistem pemerintahan desa kita tak ada jenjang karir. Jadi kepala seksi, ya selalu jadi kepala seksi. Beda kayak PNS. Kenapa di Pangguharjo dirombak ulang strukturnya. Kita

punya 12 lembaga desa. Banyak badan-badan, dari anak, budaya, makan, dll. Lalu kita bangun birokrasi pemerintahan baru. Kami gaji atas kinerja. Ada pemenuhan jam kerja, beban kerja, dan tambahan ke kinerja. Mereka dibebani 160 jam per bulan. Ini memaksa menaikkan jabatan. Idealnya D3 jadi kepala dusun, harus paham masyarakat. Sejak tahun 2015 membiayai orang kuliah lagi. Gaji pokok lulusan beda. Ini menggerakkan birokrasi.

- Kita lakukan: kita ingin berubah. Kira-kira demikian.
- Untuk pendidikan ada 4 skema: 1) Asuransi pendidikan diberikan kepada semua usia sekolah. Bahkan yang baru lahir kita asuransikan ada. Itu diberikan dari keluarga tidak mampu yang kita perkirakan 10 tahun mendatang tak berubah. 2) Beasiswa pendidikan, untuk anak dari keluarga tidak mampu tapi punya prestasi. 3) Bantuan Pendidikan Tunai, kepada anak-anak SMA. SD/SMP dikover BOS. 4) Bantuan kerjasama dengan 4 PT: Akademi Teknologi Kulit/ATK, Universitas Proklamasi 45, Stikes. Yang ini untuk warga desa kita.
- Untuk alasan tertentu di luar penduduk desa, kita bisa kaver lewat kesehatan. Ada kasus yang ibu-ibu hamil yang bukan warga. Termasuk juga anak putus sekolah, 2015 ada pelatihan kewirausahaan anak putus sekolah.
- Ada banyak faktor. Pendidikan tak melulu ekonomi. Kalau ada anak yang ingin difasilitasi full, itu dengan syarat jam 5 sore 9 malam tv harus mati, gak ada yang ngacung.
- 96 sampai hari ini gak ada tv di rumah.
- Trus terkait dengan intervensi pemerintah kabupaten, 2016 kita mendiskersi beberapa hal, dengan menambahkan satu nomenkaltur baru. 2016 kita memasukkan di tanggungan kinerja dan jadi satu-satunya perdes yang ada naskah akademiknya. Kalau bapak mau menyalahkan buat kajian akademis dulu.
- Banyak hal nalar bernegara kita kacau, narasinya narasi perlawanan. Jampersal: untuk hamil dengan persalinan gratis, ada yang beberapa

	<p>tidak direncanakan, tapi syaratnya harus KB. Lalu kami sampaikan gak usah Jampersal. Hak reproduksi dirampas. Beraninya negara sama orang kecil.</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Desa mampu mengkoreksi kebijakan-kebijakan negara yang tidak melanggar asas-asas demokrasi, bagaimana desa jadi arena demokratisasi lokal. Upaya kita desa jadi arena, warga mempunyai kesempatan arah pengembangan desa. Partispasi itu ada framingnya. - Warga negara sudah kehilangan cara berembug, jadi ruang sosial berujung pada hal yang tak produktif, menjerumuskan pada hal yang malah memiskinkan. Putaran semakin menjatuhkan pada putaran kemiskinan. Kalau ruang sosial bisa meleverage, harusnya bisa membuat kesejahteraan lebih lanjut. - Kita itu gagal mengidentifikasi diri kita. Anak sekolah yang tak bisa bayar sekolah, seolah gak masalah; hamil gak ada bapaknya juga seperti tak masalah, masalah itu ya jalan rusak. Kan aneh.
Wiwin	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk SKB 4 menteri menurut hemat kami kalau dihadapkan pengaturan yang bolak balik tak bisa deiterapkan. Di saat pertama pencarian 20% kita harus nunggu transferan 40 persen, jeda waktu itu kadang tak membuat apa-apa, tapi di akhir tahun jadi numpuk. - SKB 4 menteri 30 % HOK, kalau saya harus berani, 4 menteri soalnya tak pernah hidup di desa, gak tahu karakternya orang desa. - Kalau ada risiko pikir belakang. Saya pusing mikir aturan, cara bodonya jangan sampai uang masuk kantong kepala desa. - Pendamping malah tanya kami, <i>ngribet-nribeti</i> mas. KAUR kami baru, tapi malah banyak bertanya. Kami cari yang sudah SNI. Kemudian untuk Pak Kades bareng-bareng laksanakan saja. - Untuk Pak Agus <i>mindset</i>-nya orang desa tak siap menerima dana desa. Kita harus siap mengatur dan melakukan seminar. Bumdes dua tahun ini, untuk penghasilan belum signifikan. - Kalau Bumdesnya lebih tenar dari kadesnya itu syukur alhamdulillah, ini ukuran kades berarti berhasil mengorganisir. Tidak perlu minder.

	<ul style="list-style-type: none"> - Jadi kades lebih banyak tanggungjawabnya daripada presiden. - Di Pak Wahyudi sarjana 1000-an, di tempat saya gak ada 100 sarjana. Mengubah <i>mindset</i> masyarakat itu juga perjuangan. Pendidikan kita mau sekolah mikirnya: <i>ndek opo duwur sing penting duwik.</i> - Sekarang saatnya <i>action.</i>
Titok	<ul style="list-style-type: none"> - Dari apa yang disampaikan Pak Wahyudi dan Bu Wiwin, ada narasi perlawanan. Kalau kita melihat legal formal regulasi itu banyak bermasalah. Ini juga berhubungan dengan padat tunai karya tadi. Setelah kami cek, Pak Sunaji tanya ke Pak Wahyudi. Nanti kalau merujuk padat karya tunai ke APBDES perubahan. - Pemahaman tentang <i>potitoning</i> desa, ketika berhadapan dengan regulasi pusat tak dipahami desa. Desa takut, padahal desa punya ruang untuk mengolah semua itu. Lalu poin kedua, apa yang sebenarnya bisa dilakukan kabupaten? - Kabupaten tak memfasilitasi desa berbagi satu sama lain di satu kabupaten untuk mendorong desa menjadi lebih baik. Di Sumbawa ada desa dapat nomor satu se-Asean tapi desa tetangganya listriknya mati. Ingin bantu, tapi gak berani karena pengurusnya ketika ingin merubah ini itu takut ada aturan dari kabupaten. - Sayangnya peran kabupaten kurang. Di dalam semangat inovasi desa ada semangat perlawanannya. Ini jadi persoalan serius. - Terakhir, mengembalikan semangat berdesa, saya tak merisaukan itu. Rekrutment perangkat desa, lulus S1 untuk desa. Embrio itu sudah ada, tinggal bagaimana diisi oleh warga? Memiliki visi untuk memajukan desa. Kalau warga imajinasi tentang solidaritas sosial tidak muncul, akan sulit untuk diungkit. Membangun <i>trust</i> ini jadi PR kita bersama. Itu bisa dilakukan jika pembangunan dari aspirasi warga. Proses itukan berlangsung sekian tahun. Sehingga apa yang belum mengendap itu bisa kita ungit. - Warga itu anaknya tidak sekolah itu bukan tanggung jawab negara, tapi kalau ditanya masalahmu apa?

	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan itu lho pak. Bagaimana yang <i>private</i> itu muncul.
Sujito	<ul style="list-style-type: none"> - Dari pelajaran dan praktik-praktik pengelolaan dana desa, bisa diambil pelajaran dana desa bagian dari resolusi desa untuk melawan marjinalisasi desa. Ada bukti yang membuktikan itu bisa berubah. Pelajaran itu harus bisa dilakukan, agar desa bisa berubah. Poin saya, kemampuan mendemokratisasi desa berbanding lurus dengan politik anggaran. Maka keberhasilan seperti Pangguharjo, menjadi politik anggaran dan publik domain. - Ini bukan urusan pintar atau goblok, tapi mau atau gak. Belajar excel itu gampang, tapi <i>leadership democratic</i> itu jadi pesan penting. - Saya berharap di representasi dana desa yang berhasil harus bermunculan. Agar tak terjebak pada administrasi. - Menteri Desa dan Kemendagri juga harus berubah pola pikirnya. - Saya bertemu dengan asosiasi desa, Anda harus teriak capaian-capaian positif. Kasus OTT di Madura dan Jateng iya, tapi jangan digeneralisir. Gak <i>fair</i>. Kita didik desa dengan demokratisasi, bukan mendatangkan kekuatan luar. <i>Good governance</i> desa itu dari masyarakat desa. Desa bisa diangkat dengan pengalaman beragam. - Terima kasih ini diskusi IRE untuk megawal transformasi.
Nurma	<ul style="list-style-type: none"> - Terima kasih untuk pembicara. Diskusi kami cukupkan di sini, maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum wr. wb.
MC	<ul style="list-style-type: none"> - Demikian capaian yang diraih. Sebelum kita tutup, ada pembagian cendera mata kepada Bu Wiwin dan Pak Wahyudi yang akan diberikan oleh Pak Sunaji.